

**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**

Banda Aceh, Rabu (21 April 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Pidie Jaya, **Kadir Jailani**, dan Bupati Pidie Jaya, **Aiyub Bin Abbas**, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Belanja Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRK Melebihi Ketentuan; (2) Tunjangan Khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati Tidak Sesuai Ketentuan; dan (3) Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS yang Menjalani Hukuman Disiplin dan Potensi Kelebihan Pembayaran Gaji.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Pidie Jaya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Merevisi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie Jaya serta Pimpinan DPRK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRK Pidie Jaya dengan menyetorkan ke Kasda; (2) Tidak menganggarkan dan merealisasikan tunjangan khusus Bupati dan Wakil Bupati; dan (3) Menginstuksikan Kepala SKPK terkait supaya mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran gaji PNS yang menjalani hukuman disiplin dengan menyetorkan kelebihan bayar ke Kasda.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan 